

**2015**



**PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

# **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

### 1. PENDAHULUAN

Tahun 2016 mendatang adalah tahun pertengahan dari 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Gubernur H. Alex Noerdin dan Wakil Gubernur H. Ishak Mekki. Tahun pertengahan menjadi masa yang penting untuk mengevaluasi 2 (dua) tahun pertama untuk kemudian menuju 2 (dua) tahun berikutnya. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengkaji keberhasilan dan juga kekurangan pelaksanaan dan capaian setiap program, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Kinerja Pembangunan tahun 2014 perlu dikaji secara komprehensif sinerginya dengan tema pembangunan tahun 2014 yakni 'Mempertahankan Kesenambungan Pembangunan Menuju Sumatera Selatan Yang Lebih Maju'. Sementara program dan kegiatan tahun 2015, yang anggarannya telah disahkan dan segera akan dilaksanakan, harus juga dicermati bahkan diperketat agar kinerjanya bersinergi dengan tema pembangunan tahun 2015 yakni 'Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Potensi Daerah'.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan tahun 2015, kebijakan pembangunan pemerintah Pusat, dengan APBNnya, mutlak perlu diselaraskan oleh daerah. 2 (dua) kebijakan pokok Pemerintah Pusat, Trisakti dan Nawacita, sebagaimana dijabarkan ke dalam RPJMN tahun 2015-2019 harus diselaraskan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

### 2. KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

Dalam RPJPN 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk 'lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat'. Berdasarkan arahan tersebut, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019 diarahkan untuk mencapai 'perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan'.

Selanjutnya dengan berlandaskan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti, dirumuskan visi tahun 2015-2019 yaitu 'Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti), dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- d. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.



- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam RPJMN Buku 3 tentang Agenda Pembangunan Wilayah, telah diusulkan tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera sebagai 'salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batubara, serta industri berbasis komoditas padi, kopi, teh, ikan patin, kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin; pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan potensi kelapa sawit menjadi bio diesel, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari'. Musrenbang RPJMN Regional Sumatera yang dilaksanakan di Belitung tanggal 13 Desember 2014 yang lalu menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN. Untuk itulah maka program dan kegiatan yang diusulkan haruslah realistis, berdampak besar, dan mencapai visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan.

Kesesuaian program prioritas daerah Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan Nawa Cita (NC) adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Kamtibmas, sesuai dengan Nawa Cita huruf b (NC-c)
- 2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya (NC-d, NC-e dan NC-h)
- 3) Penanggulangan Kemiskinan (NC-d dan NC-e)
- 4) Pembangunan Pertanian/Hilirisasi ( NC-d dan NC-f)
- 5) Infrastruktur dan Energi (NC-d, NC-f dan NC-g)
- 6) Investasi dan Pengembangan Usaha (NC-f)
- 7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana (NC-f)
- 8) Pengembangan Wilayah (NC-e dan NC-f)

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 terbukti telah bersinergi dengan RPJMN Tahun 2015-2019. Namun pelaksanaan setiap program dan kegiatan sangat membutuhkan konsistensi yang harus secara cerdas disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi senantiasa dibayangi oleh ancaman meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, sudah selangkah lebih diutamakan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Provinsi, sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan kemajuan Nasional. Untuk memastikan terlaksananya konsistensi pelaksanaan RPJMD dalam Renstra SKPD yang terakumulasi secara tahunan dalam RKPd, maka akan diterapkan e-Planning yang dimulai sejak penyusunan RKPd Tahun 2016.

### **3. KEBIJAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 memuat, diantaranya, tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota. Termasuk di dalamnya adalah target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (terlampir).



Memperhatikan target yang telah dirumuskan dan dengan membandingkannya dengan capaian akhir tahun 2014, maka harus diakui bahwa banyak target tersebut yang belum tercapai.

**INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MAKRO DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	RPJMD TAHUN 2013		RPJMD TAHUN 2014		TARGET RPJMD TAHUN 2015	TARGET RPJMD TAHUN 2016
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6	5,98	6	5,1-5,7	6	6,25
2	Inflasi	%	4	6	4	6,28-6,78	4	4
3	ICOR	%	3,50	4,79	3,50	4,05	3,50	3,25
4	PDRB (ADHB)	Triliun (Non Migas)	232,3	231,6	257,4	253,8*	272,6	294,2
5	PDRB (ADHK)	Triliun (Migas)	77.994	76.409	82.674	79.521*	87.634	93.111
6	Ekspor	Juta US\$	2.722,10	3.303,079	2.790,15	2.640,44	2.858,20	2.926,25
7	Impor	Juta US\$	493,98	467,56	579,31	548,33	579,31	612,04

\*Sangat sementara

Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik), Institusi Terkait, Laporan Perekonomian Sumsel menurut PDRB

Adapun perkembangan harga beberapa komoditas unggulan yang ada di Sumatera Selatan adalah

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	KETERANGAN
1	Harga Beras (medium)	Rp. (harga di tingkat konsumen)	8.465	9.261*	Hasil olahan Bappeda dengan BPS Prov. Sumsel
2.	Harga Karet	Rp. (harga di tingkat petani)	5.500-6.000	7.000	Data realisasi th. 2013 dan per 6 Des 2014
3.	Nilai Ekspor Karet	Juta US \$ (FOB)	2.203,43	1.613,39*	Hasil olahan Bappeda dengan BPS Prov. Sumsel
4.	Harga Kelapa Sawit (CPO)	Rp/Kg	8.776,68	7.635,16*	Data hasil olahan Bappeda
5.	Nilai Ekspor Kelapa Sawit (CPO)	Juta US \$ (FOB)	133,42	77,3*	Hasil olahan Bappeda dengan BPS Prov. Sumsel
6.	Harga Kopi	Rp/Kg	15.000	17.000*	Data realisasi th. 2013 per 16 Juli 2013
7.	Nilai Ekspor Kopi	Juta US \$ (FOB)	7,90	5,84*	Hasil olahan Bappeda dengan BPS Prov. Sumsel
8.	Harga Batubara	Juta US \$ (FOB)	63	70*	Kajian Ekonomi Sumsel Tw.III th. 2014 dan Bloomberg's Research and Market tahun 2014



NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	KETERANGAN
9.	Produksi Batubara	Juta Ton	23,98	24,60	Data th. 2014 s.d bulan Nopember, sumber: Distamben Prov. SS
10.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	110,03	97,50*	Berita Resmi Statistik BPS Prov. Sumsel, bulan Desember 2014

\*Sangat sementara; Data Realisasi akan dipublikasi per Maret 2015

Dengan menyadari besarnya potensi dan peluang pembangunan mulai tahun 2015 ini, yang ditandai oleh beberapa fokus dan prioritas RPJMN yang terbukti bersinergi dengan RPJMD Prov. Sumsel, maka mutlak perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan yang tersebar di SKPD. Penajaman dimaksud bermakna untuk kesesuaiannya dengan kemampuan pendanaan yang ada, sehingga diharapkan tetap tercapai hasil yang optimal.

Membandingkan keuangan daerah (APBD Prov. Sumsel) yang ada dengan target di dalam RPJMD, maka jelas masih sangat diperlukan kerja keras dengan melakukan efisiensi, efektivitas, keterpaduan, kemanfaatan, ketepatan baik lokasi maupun penerima manfaat proyek, dan rasional.

#### TARGET KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015	TARGET RPJMD APBD 2016
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>6,000,782,738,000.00</b>	<b>6,478,705,535,564.65</b>	<b>7,193,702,636,596.00</b>	<b>9,460,390,000,000.00</b>
	a. Pendapatan Asli Daerah	2,214,420,245,000.00	2,579,058,071,303.00	2,784,966,905,383.00	3,161,960,000,000.00
	b. Dana Perimbangan	2,951,325,613,000.00	3,056,056,793,031.00	3,262,707,213,031.00	5,468,750,000,000.00
	c. Pendapatan Lain-lain Yang Sah	835,036,880,000.00	843,590,671,230.65	1,146,028,518,182.00	829,680,000,000.00
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>6,221,526,149,006.89</b>	<b>6,044,350,393,164.52</b>	<b>6.609.708.624.576.00</b>	-
	a. Belanja Langsung	2,250,343,253,150.00	1.928.607.568.305.00	3,079,583,930,400.00	-
	b. Belanja Tidak Langsung	3,971,182,895,856.89	4.115.742.824.859.52	3,530,124,694,176.00	-
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>220,743,411,006.89</b>	<b>(434,355,142,400.13)</b>	<b>(583,994,012,020.00)</b>	-
	a. Penerimaan Pembiayaan	521,334,563,016.89	10,179,492,465.79	110,000,000,000.00	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	300,591,152,010.00	444,534,634,865.92	693,994,012,020.00	-

Di samping program prioritas baik yang tercantum dalam RPJMD maupun yang sudah berlangsung (seperti Sekolah Gratis, Berobat Gratis), terdapat beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan persiapan dan/atau ditingkatkan kelangsungannya hingga tahun 2018, antara lain:

- > Asian Games 2018
- > Masjid Raya Sriwijaya
- > Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- > Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Carat
- > Pembangunan Rel Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api
- > Pembangunan Monorail Bandara SMB II-Jakabaring



- > Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya, Palembang-Betung, dan Palembang-Kayuagung
- > Pembangunan Jembatan Musi IV, V, dan VI
- > Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya
- > Pengembangan Pusat Penelitian Ikan Air Tawar Asia Tenggara
- > Pembangunan Pusat Kerbau Rawa
- > Penanggulangan Kebakaran Hutan
- > Pengelolaan Dana Desa
- > Lumbung Energi Nasional
- > Lumbung Pangan

Selain daripada itu, perlu juga diperhatikan bahwa dalam tahun 2015 ini akan berlangsung Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten (Ogan Ilir, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir). Oleh karenanya tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD ketujuh Kabupaten tersebut, sehingga penyusunan RKPD tahun 2016 yang dimulai prosesnya pada tahun 2015 ini tentu harus memperhatikan kesinambungan pembangunan kepada pemerintahan yang baru.

#### 4. FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Dengan mengacu kepada visi, misi dan 8 (delapan) program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, tahap pembangunan tahun 2016 bertemakan 'Percepatan Pembangunan Infrastruktur'. Tahapan ini menitikberatkan pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta pengembangan pariwisata berstandar internasional.

Tahap pembangunan tahun 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api.
- d. Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
- f. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan.
- g. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
- h. Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah.
- i. Meningkatkan kerjasama riset unggulan.

Hal-hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2016 tersebut tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2014 dan juga yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 ini. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengkaji capaian tahun 2014 yang baru saja kita akhiri, namun karena data capaiannya seringkali belum tersedia/terukur maka data capaian tahun 2013 dapat digunakan





sebagai tolok ukur. Adapun data capaian tahun 2015 pastilah belum dapat digunakan mengingat program dan kegiatan baru akan dimulai. Namun asumsi target yang realistis dan objektif untuk capaian tahun 2015 dapat dipakai. Argumen di atas seharusnya dapat membantu SKPD menyusun usulan program dan kegiatan yang realistis, objektif, terukur, dan secara optimal mencapai keseluruhan fokus pembangunan tahun 2016.

Lebih daripada itu, sinergi yang maksimal dengan APBN diharapkan tercapai terutama dalam berbagai bidang sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI dalam Musrenbangnas RPJMN tanggal 18 Desember 2014 yang lalu, yakni:

- 1) bidang Pangan, yang menargetkan tercapainya swasembada beras dalam 3 (tiga) tahun. Tahun berikutnya dilanjutkan dengan fokus pada komoditi gula dan jagung. Membangun 49 waduk dalam 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2015 dengan membangun 13 waduk untuk mencapai ketersediaan irigasi yang mampu mengairi 1 juta ha.
- 2) bidang Energi, dengan mendahulukan penyederhanaan perijinan untuk memangkas berbagai hambatan regulasi. Target 5 (lima) tahun adalah tersedianya energi listrik sebesar 35.000 MW.
- 3) bidang Kemaritiman, dengan membangun 24 pelabuhan sekaligus meningkatkan kapasitas pelabuhan yang sudah ada. Mengembangkan sentra perikanan dan membasmi 'illegal fishing' untuk meningkatkan pendapatan nasional. Membangun toll laut yang dimulai dengan ketersediaan infrastruktur pelabuhan, yang untuk ini mutlak perlu suatu kawasan pelabuhan yang luas.
- 4) bidang Pariwisata, dengan menekankan upaya mengatasi masalah yang selama ini berpengaruh besar dalam peningkatan wisatawan. Permasalahan dimaksud meliputi promosi, kemasan produk, dan pembangunan karakter pariwisata yang menyangkut budaya masyarakat.
- 5) bidang Pertumbuhan Ekonomi, yang menekankan pada pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah produk. Untuk itu perlu penyederhanaan berbagai aturan yang ada dan meningkatkan peran PTSP di daerah.
- 6) bidang Infrastruktur, yang akan memulai pembangunan Trans Sumatera Railway dan Toll Sumatera pada tahun 2015. Dibutuhkan dukungan daerah untuk proses pembebasan lahan.
- 7) bidang Sumber Daya Manusia, dengan penegasan pada perubahan karakter, nilai dan pola pikir, terutama di lingkungan aparat pemerintah atau birokrasi. Bahaya Narkoba merupakan lampu merah yang membuat Indonesia sudah masuk pada tahap krisis narkoba. Untuk itu pemerintah tidak akan memberikan grasi kepada penderita narkoba yang dihukum penjara.

Menuju kepada apa yang diinginkan baik dalam RPJMN maupun RPJMD, beberapa evaluasi terhadap pembangunan di tahun 2014 yang baru saja berakhir dan tahun 2015 yang baru dimulai menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Berbagai event olahraga berskala internasional yang telah diselenggarakan di tahun 2014 menjadi moment yang sangat penting untuk semakin memperkenalkan Sumatera Selatan kepada dunia luar, menggiatkan aktivitas perekonomian yang semakin tinggi, terbukti dengan meningkatnya kunjungan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas maupun profesi tertentu. Hal ini tentu saja menjadi harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Di sisi keberhasilan tersebut masih ada sisi lain yang memerlukan kerja ekstra keras tidak hanya pemerintah akan tetapi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan, yakni perlambatan penurunan angka kemiskinan. Dari analisis diperoleh data bahwa angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Sumatera Selatan bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagaimana kita sadari bahwa meningkatnya kemiskinan di perdesaan dipengaruhi pula oleh turunnya harga karet dan sawit di pasar dunia sehingga berpengaruh pada pendapatan petani. Oleh karenanya mutlak perlu penajaman pada berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.



UMKM harus pula menjadi perhatian penting karena memiliki kemampuan bertahan yang sangat tinggi terhadap fluktuatif perekonomian di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perkuatan. Hilirisasi produk-produk unggulan Sumatera Selatan juga dapat dimulai dengan keberadaan UMKM. Namun demikian harus dijamin pula ketersediaan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan, dan percepatan terhadap tersedianya outlet yang representatif di Kawasan Tanjung Api-Api bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di Sumatera Selatan mewujudkan pada analisa bahwa program dan kegiatan harus dipertajam dan lebih fokus untuk mencapai sasarannya mengingat alokasi anggaran yang terbatas, sehingga perlu dibarengi dengan analisis yang lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi provinsi ini sehingga tepat sasaran dan lokasi, sekaligus untuk meningkatkan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Beberapa percepatan dan penajaman program dan kegiatan dalam tahun 2016 mendatang perlu dilakukan, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, dibarengi dengan memperhatikan capaian pembangunan daerah hingga akhir tahun 2014. Hal ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di 2 (dua) tahun terakhir berikutnya (2017-2018) untuk mencapai terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju, dan Berdaya Saing Internasional.

Beberapa program dan kegiatan yang memerlukan percepatan:

- a) Penyelesaian proyek-proyek Tahun Jamak
- b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- c) Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Carat
- d) Pembangunan Rel Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api
- e) Pembangunan Monorail Bandara SMB II-Jakabaring
- f) Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya, Palembang-Betung, dan Palembang-Kayuagung
- g) Pembangunan Jembatan Musi IV, V, dan VI

Beberapa program dan kegiatan yang memerlukan penajaman:

- a) Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti dengan semakin meningkatnya peran aktif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, tepat lokasi.
- b) Program dan kegiatan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan dan distribusi produksi sumber daya alam.
- c) Program dan kegiatan penguatan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian beserta upaya hilirisasinya, sektor pariwisata, dan sektor industri.

## 5. RANCANGAN JADWAL KEGIATAN MUSRENBANG

Hingga saat ini belum diketahui bentuk dan format pelaksanaan Musrenbangnas. Belum juga diperoleh informasi bentuk dan format Musrenbang Daerah yang diharapkan Pemerintah Pusat. Namun demikian, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi ini dirasa perlu untuk secara dini disebarkan ke daerah Kabupaten/Kota dan SKPD baik vertikal maupun horizontal. Keterlibatan SKPD Provinsi dalam kegiatan penjelasan Arah Kebijakan ini ke Kabupaten/Kota tentunya akan sangat bermanfaat untuk secara dini memperoleh masukan daerah, sekaligus juga mengkomunikasikan kebijakan sektoral ke daerah.





Adapun jadwal penjelasan Arah Kebijakan ke Kabupaten/Kota adalah:

WAKTU PELAKSANAAN		KABUPATEN/KOTA		KABUPATEN/KOTA	
Tanggal	Hari	Kelompok A		Kelompok B	
19 January, 2015	Senin	1.	Pagar Alam	6.	Lubuk Linggau
20 January, 2015	Selasa	2.	Empat Lawang	7.	Musi Rawas
21 January, 2015	Rabu	3.	Lahat	8.	Musi Rawas Utara
22 January, 2015	Kamis	4.	Muara Enim	9.	Musi Banyuasin
23 January, 2015	Jum'at	5.	PALI	10.	Banyuasin
26 January, 2015	Senin	11.	OKU Selatan	14.	OKI
27 January, 2015	Selasa	12.	OKU	15.	Ogan Ilir
28 January, 2015	Rabu	13.	OKU Timur	16.	Prabumulih
29 January, 2015	Kamis			17.	Palembang
30 January, 2015	Jum'at				

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diharapkan berlangsung dalam bulan Maret dengan maksimum akhir pelaksanaannya adalah pada tanggal 20 Maret 2015. Selanjutnya rangkaian kegiatan Musrenbang Provinsi diawali oleh kegiatan Rakornis SKPD Provinsi yang diharapkan berlangsung dalam bulan Pebruari 2015 sekaligus untuk menyusun Renja SKPD tahun 2016. Selanjutnya kegiatan Forum SKPD Provinsi direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir Maret 2015 dan Musrenbang Provinsi pada pertengahan bulan April 2015.

Disela-sela berbagai kegiatan daerah tersebut, perlu juga mengikuti kegiatan Pusat dalam rangkaian proses Musrenbangnas, diantaranya adalah Konreg K/L, Musrenbangpus, Musrenbangnas, dan paska Musrenbangnas.

Kepentingan Daerah terhadap Pusat tentunya terutama terletak pada dukungan dana APBN dalam berbagai program dan kegiatan daerah. Untuk itulah sangat diperlukan sinergi antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD dengan RPJMD, RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi, dan RKPd dengan RPJMN. Indikator sinergi dimaksud adalah seberapa banyak dan besar tertampungnya aspirasi daerah Kabupaten/Kota dalam RKPd Provinsi dan RKP, dan seberapa banyak dan besar tertampungnya aspirasi daerah Provinsi dalam RKP.

## 6. PENUTUP

Mengingat semakin besarnya aspirasi masyarakat, daerah dan berbagai pelaku pembangunan, maka diperlukan batasan-batasan yang dapat disepakati bersama mengingat ketersediaan anggaran yang pasti tidak mampu menampung banyaknya usulan dan aspirasi dimaksud. Di sisi lain, batasan tersebut haruslah tetap objektif dan rasional.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, maka dimulai pada tahap penyusunan RKPd Tahun 2016 ini digunakan e-Planning. Penggunaan piranti ini dimaksudkan untuk mempermudah penilaian terhadap usulan yang diterima yang mutlak harus berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Adapun ruang fleksibilitas tetap harus disediakan mengingat sifat pembangunan yang senantiasa dinamis dan harus tetap selaras dengan perkembangan lingkungan strategis, baik tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, regional maupun nasional dan global. Mengingat sifat, kemanfaatan dan strategisnya, maka ruang fleksibilitas dimaksud sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.



## Lampiran

## TARGET KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran terbuka (%)	Kemiskinan (%)	Indeks Pembangunan Manusia
1	Ogan Komering Ulu	7,33	4,21	10,29	74,95
2	Ogan Komering Ilir	6,59	8,52	12,37	72,28
3	Muara Enim	5,46	3,37	12,15	72,45
4	Lahat	6,20	3,98	15,74	73,35
5	Musi Rawas	5,63	1,85	16,24	69,98
6	Musi Banyuasin	3,33	4,81	17,09	74,41
7	Banyuasin	6,28	4,85	9,95	71,46
8	OKU Selatan	7,35	2,50	9,19	73,01
9	OKU Timur	7,21	2,29	8,21	71,65
10	Ogan Ilir	7,22	4,33	11,25	71,37
11	Empat Lawang	6,34	2,78	12,17	70,60
12	Palembang	8,81	9,53	11,84	78,26
13	Prabumulih	5,77	7,72	10,52	76,51
14	Pagaralam	6,38	3,95	7,78	75,03
15	Lubuk Linggau	6,60	4,66	13,08	72,26
16	Penukal Abab Lematang Ilir				
17	Musi Rawas Utara				
18	<b>Sumatera Selatan</b>	6,25	3,63	12,75	74,90